



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2022



Jl. R.M. Tirto Adhi Soerjo No.3
Kota Bogor

Kode Pos 16161
Telp/Fax. (0251) 8331753
e-mail : dinkes@kotabogor.go.id

 www.dinkes.kotabogor.go.id
 [@dinkeskotabogor](https://www.instagram.com/dinkeskotabogor)
 Dinas Kesehatan Kota Bogor
 [@BogorDinkes](https://twitter.com/BogorDinkes)



Kata Pengantar

KEPALA DINAS KESEHATAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Sang Mahakuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, masih terdapat indikator sasaran yang belum mencapai target yang telah diharapkan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang dalam mewujudkan Clean Government dan Good Government yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Demikian laporan ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Bogor, 20 Februari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008

DAFTAR ISI

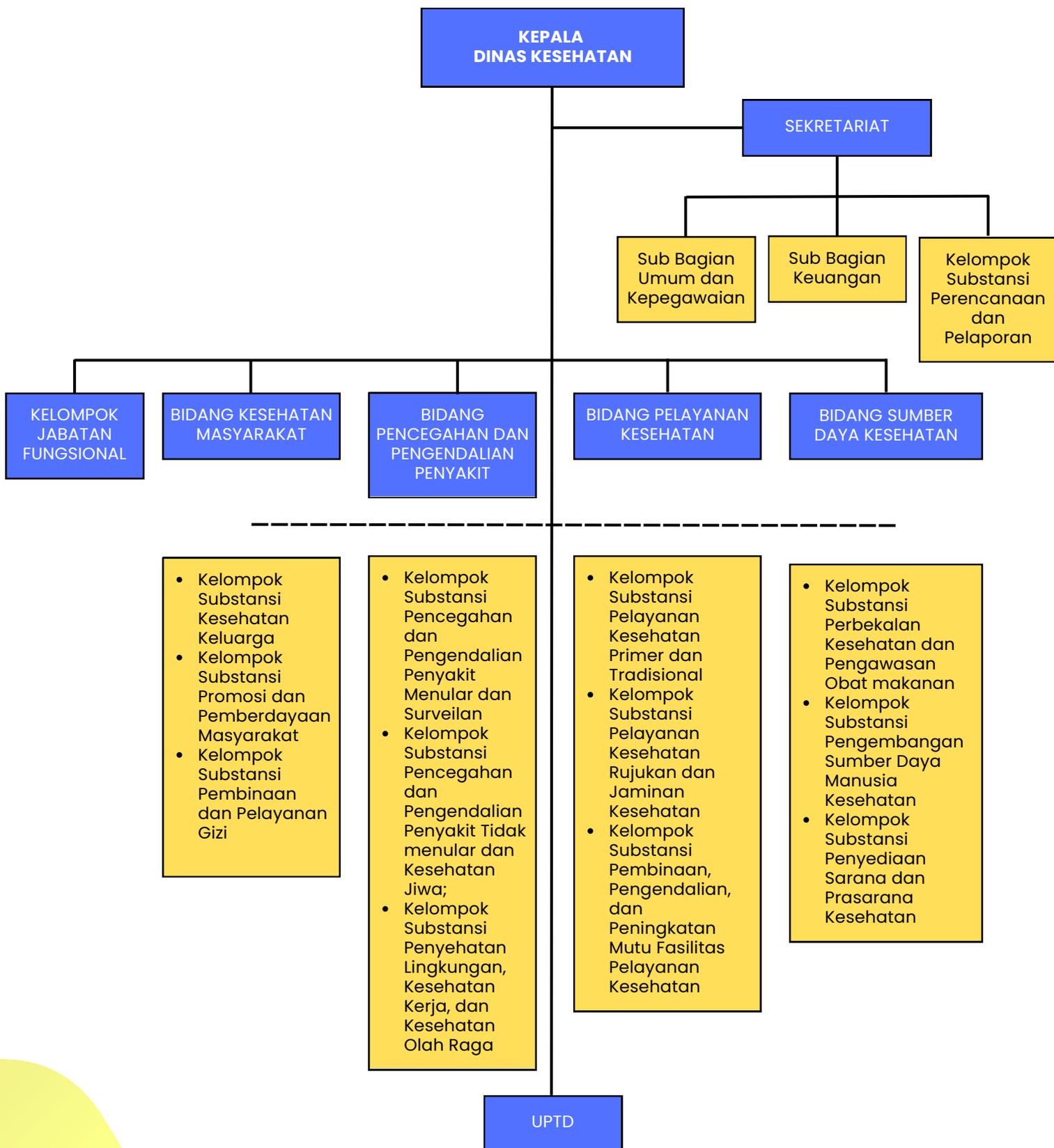
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	3
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB 4 PENUTUP	29

BAB 1

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, **Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :**



1 dari 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mewujudkan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui **peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.**

Terdapat 5 (lima) poin yang menjadi fokus RPJMN guna meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui :

- 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.
- 2.Percepatan perbaikan gizi masyarakat.
- 3.Peningkatan pengendalian penyakit.
- 4.Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- 5.Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Lima poin sebagaimana diatas juga menjadi isu strategis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam melaksanakan upaya pembangunan kesehatan di Kota Bogor. **Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus Dinas Kesehatan yaitu :**

- 1.Implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
- 2.Mewujudkan Generasi yang Sehat Menghadapi Bonus Demografi
- 3.SUN-Scaling Up Nutrition (Gerakan 1000 HPK)
- 4.Adanya Beban Ganda Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Tripple Barden) terutama TB, HIV/AIDS, DM, Hipertensi, Gangguan Jiwa
- 5.Komitmen Global berupa Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Target nasional berupa Komitmen eliminasi penyakit menular khususnya Indonesia eliminasi TB Paru Tahun 2030
- 6.Peningkatan Akses Sanitasi Layak
- 7.Pencegahan dan penanggulangan Covid-19
- 8.Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 9.Penyelenggaraan akses layanan melalui Kunjungan dokter keluarga
- 10.Penyelenggaraan layanan kesehatan Konseling dan Call Center 24 Jam pada fasilitas kesehatan
- 11.Pembangunan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS PK)
- 12.Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta
- 13.Kebijakan pemerintah Kab/kota untuk Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage)
- 14.Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar
- 15.Smart Health System (Pendekatan Pelayanan Dengan Sistem Teknologi Informasi) yang terintegrasi
- 16.Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

VISI KOTA BOGOR

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan mendukung Visi Kota Bogor. Adapun Visi Kota Bogor sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2019-2024 yaitu :

"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga"

MISI KOTA BOGOR

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Wali Kota Bogor memiliki misi sebagai berikut :

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Sehat

1

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Cerdas

2

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Sejahtera

3

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan mendukung Misi Kota Bogor yang ke 1 dan 2.

Cascading kinerja dalam rangka mendukung Misi 1 Kota bogor sebagai berikut :

RPJMD

Misi 1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	
Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang Berkualitas	
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Indikator : Angka Harapan Hidup (AHH)	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS



Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Tujuan 2. Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat
Indikator : Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
Sasaran 1. Terwujudnya Keluarga Sehat	Sasaran 2. Meningkatkan Rumah tangga sehat
Indikator : Indeks Keluarga Sehat	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

RENSTRA DINAS KESEHATAN

Cascading kinerja dalam rangka mendukung Misi 2 Kota bogor sebagai berikut :

RPJMD

Misi 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani

Sasaran 1.2.1 :
Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



RENSTRA DINAS KESEHATAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan Kota Bogor

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah

Misi 1 dan 2 yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran di tingkat kota selanjutnya diterjemahkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran guna mendukung pencapaian Misi 1 dan 2 Kota Bogor.

Penjabaran program Dinas Kesehatan yang mendukung tercapainya kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Program Dinas Kesehatan Kota Bogor

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat	Meningkatnya Rumah tangga sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019–2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan kemudian selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022.

Berikut sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2022 :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4 Point
2.	Meningkatnya Rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) indikator diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pada tahun 2022, ketercapaian kinerja mencapai 95,9% dari keseluruhan indikator. Adapun rincian realisasi per indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran Dinas Kesehatan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4 Point	0,26 Point	0,4 Point
Meningkatnya Rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70%	69,3%	70,2%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01	A	77,05

Sasaran 1

Terwujudnya Keluarga Sehat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Terwujudnya Keluarga Sehat adalah Indeks Keluarga Sehat. Terdapat 12 (Dua Belas) Indikator yang dapat menggambarkan pencapaian indeks keluarga sehat diantaranya yaitu :



1

Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)



2

Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan



Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

3



Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

4



Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

5



6

Penderita Tuberculosis Paru
mendapatkan pengobatan
secara teratur



7

Penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur



8

Penderita gangguan jiwa
mendapatkan pengobatan dan
tidak ditelantarkan



9

Anggota keluarga tidak ada yang merokok



10

Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



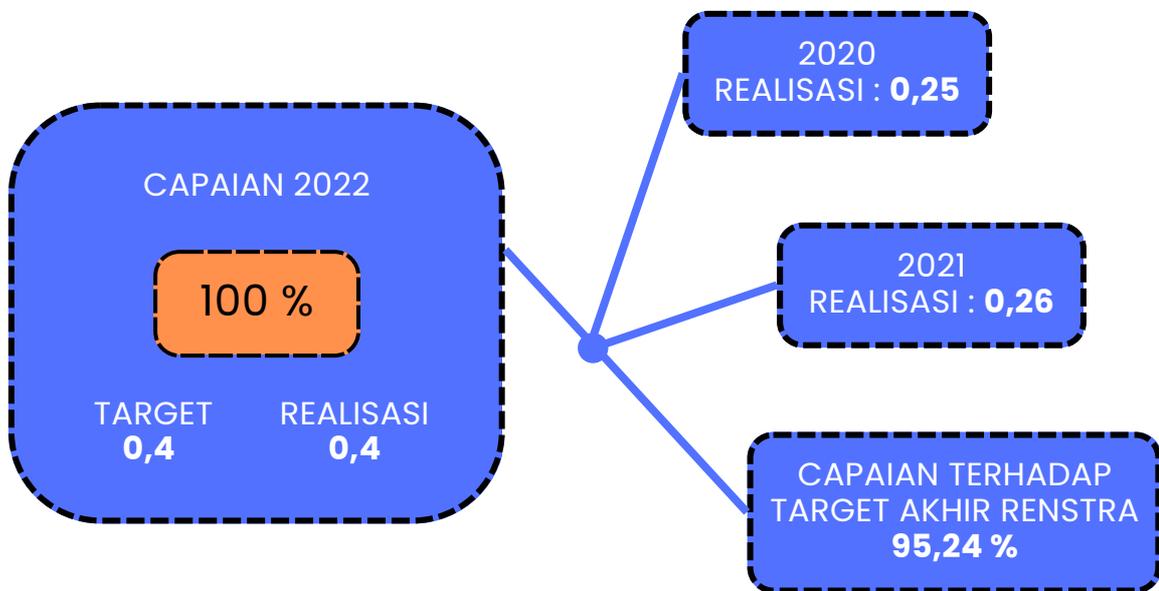
11

Keluarga mempunyai akses sarana air bersih



12

Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat



BAGAN 3.1 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KELUARGA SEHAT

Indeks Keluarga Sehat merupakan gambaran dari Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

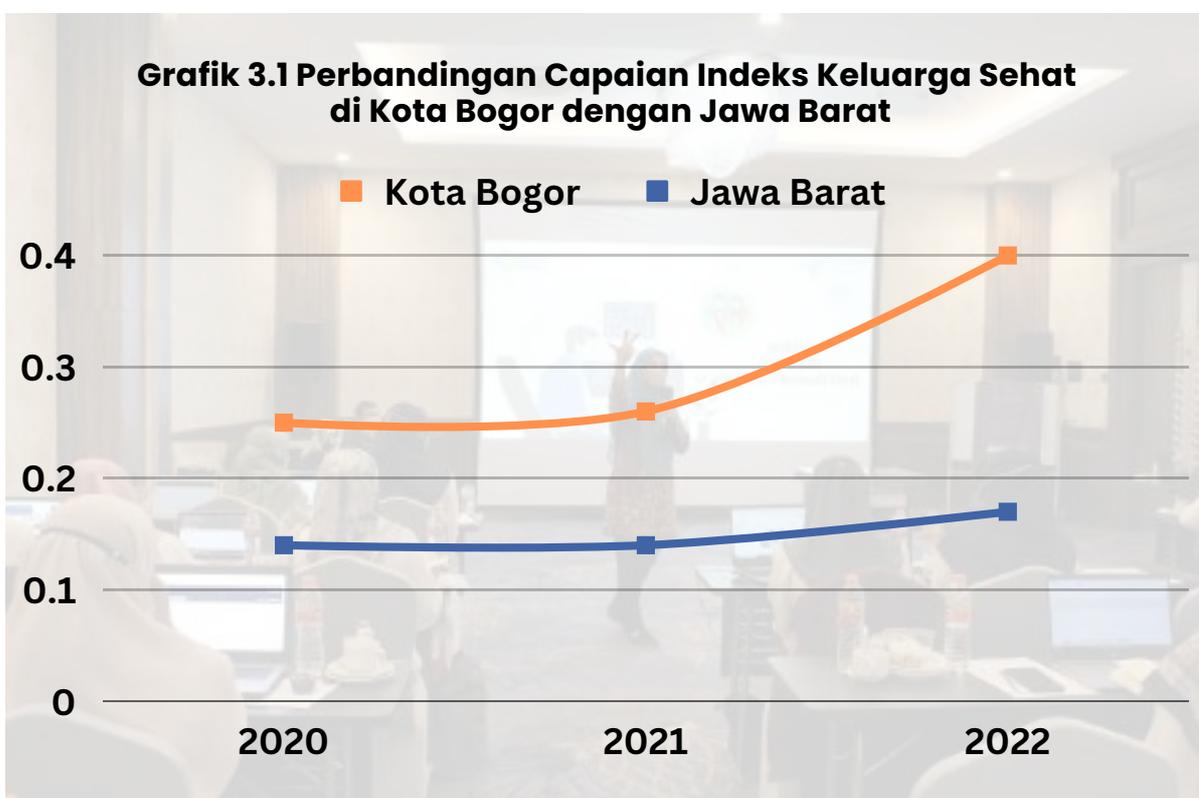
Tujuan dari pelaksanaan PIS-PK yaitu untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi :

- pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;

- mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan
- diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Bagan 3.1 dapat dilihat bahwa capaian indeks keluarga sehat (IKS) di tahun 2022 sebesar 100% (tercapai) dan bila dibandingkan dengan target akhir rencana strategis perubahan Dinas Kesehatan Kota Bogor capaian indeks keluarga sehat sebesar 95,24%.

Selain itu, jika dibandingkan dengan capaian indeks keluarga sehat di Jawa Barat, capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor berada diatas capaian Jawa Barat dan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor maupun Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dari Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor dengan Jawa Barat di bawah :



- Tahun 2020 capaian Kota Bogor (0,25 point) lebih tinggi sebesar 0,11 point dari capaian Jawa Barat (0,14 point).
- Begitu pun pada Tahun 2021, capaian Kota Bogor (0,26 point) lebih tinggi sebesar 0,12 point dari capaian Jawa Barat (0,14 point).
- Serta di Tahun 2022, capaian Kota Bogor (0,40 point) lebih tinggi sebesar 0,23 point dari capaian Jawa Barat (0,17 point).

Upaya yang telah dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor maupun Puskesmas untuk dapat meningkatkan capaian intervensi dan IKS Puskesmas.

● Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan PIS-PK

1



Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor

2



Refreshing terkait konsep PIS-PK, Penggunaan Aplikasi dan Analisis hasil PIS-PK

3



Pembinaan Teknis PIS-PK

4



● Upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas

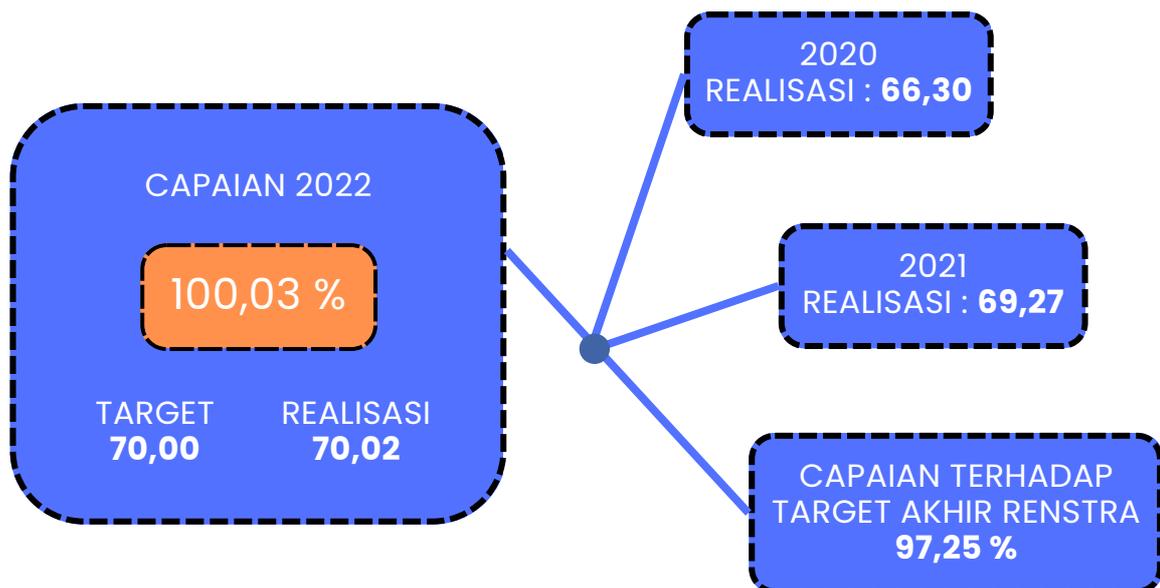
1. Update data dalam Aplikasi KS
2. Intervensi lanjut yang terintegrasi dengan program terkait
Ada beberapa tingkatan intervensi yang dapat dilakukan oleh Puskesmas yaitu :
 - Intervensi tingkat individual, sasarannya adalah individu. Contoh intervensi yang diberikan berupa anjuran untuk segera berobat secara rutin ke faskes jika dalam kunjungan keluarga ada salah satu anggotanya terdeteksi menderita hipertensi, dll
 - Intervensi tingkat keluarga, sasarannya adalah keluarga. Contoh intervensi yang diberikan berupa anjuran pengadaan sarana air bersih, jamban sehat, anjuran tidak merokok bagi kepala keluarga, karena efeknya untuk semua keluarga, dll
 - Intervensi tingkat masyarakat yang disebut sebagai UKM (upaya kesehatan masyarakat) atau *public health intervention*. Bentuknya beragam, bisa berupa menumbuh-kembangkan UKBM, penerapan kawasan tanpa rokok, pemicuan STBM, pemicuan P2TMBM, Upaya Kesehatan Masjid, dll.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor terkait.

Sasaran 2 Meningkatnya rumah tangga sehat



Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya rumah tangga sehat, diukur melalui indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS. Adapun Data PHBS rumah tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh petugas promosi kesehatan puskesmas dan kader di masing-masing RW.

Hasil survei tersebut kemudian dilanjutkan dengan penginputan sekaligus pengolahan data oleh petugas promkes puskesmas. Persentase Rumah tangga ber-PHBS ditentukan dari capaian 10 indikator PHBS rumah tangga. Apabila terdapat 1 dari 10 indikator yang tidak tercapai, maka akan dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak ber-PHBS.



BAGAN 3.2 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE RUMAH TANGGA BER-PHBS

Berdasarkan Bagan 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Rumah tangga ber-PHBS Tahun 2022 sebesar 100,03% dan bila dibandingkan dengan target akhir perubahan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor capainnya sebesar 97,25%.

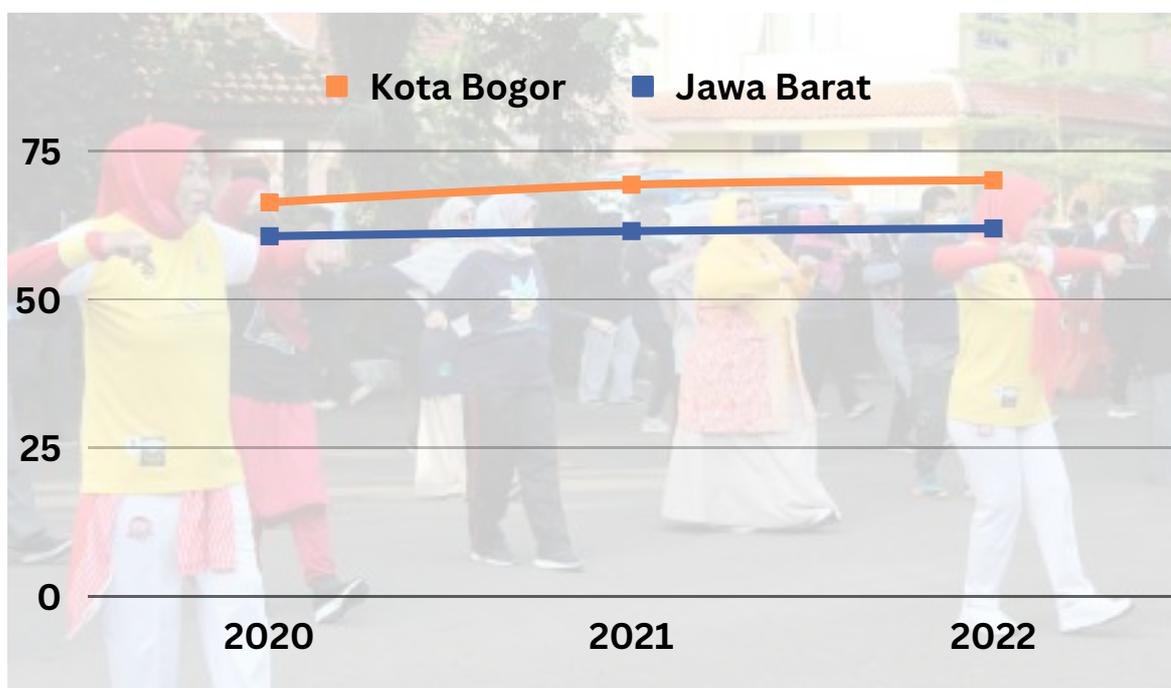
Tabel 3.2 Capaian Indikator Persentase Rumah tangga ber-PHBS

Indikator	Realisasi		Target	Realisasi	Capaian
	2020	2021	2022		
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	66,3	69,3	70	70,02	100,03%

Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun capaian persentase rumah tangga ber-PHBS menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 diatas.

- Tahun 2022 realisasi persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 70.02% sudah mencapai target indikator yaitu 70.0%
- Untuk realisasi persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2021 (69.3%) terjadi kenaikan sebesar 3.0% dari realisasi tahun 2020 (66.3%);
- Serta terdapat kenaikan realisasi persentase rumah tangga ber PHBS dari realisasi tahun 2021 (69.3%) ke tahun 2022 (70.0%) sebesar 0.7%.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Kota Bogor dengan Jawa Barat



Sumber : Profil Kesehatan Jawa Barat 2020 dan 2021.

Begitupun halnya bila dibandingkan dengan capaian jawa barat, capaian Dinas Kesehatan Kota Bogor berada di atas capaian Jawa Barat.

- Capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat Tahun 2020 sebesar 60,6 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 5,7%.
- Tahun 2021 capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat sebesar 61,47 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 7,8%.
- Selain itu, Tahun 2022 capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat sebesar 61,91 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 8,11%.

Adapun perbandingan realisasi persentase 10 indikator PHBS rumah tangga tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator PHBS Rumah Tangga Tahun 2019 s/d 2022

No	10 Indikator PHBS Rumah Tangga	2019	2020	2021	2022
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	95.0	94.4	93.8	97.7
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	72.4	68.4	70.4	72.1
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	90.5	83.7	85.7	87.1
4	Menggunakan air bersih	98.2	95.5	98.3	99.2
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96.7	96.3	97.7	98.9
6	Menggunakan jamban sehat	86.2	83.4	85.1	84.7
7	Memberantas jentik nyamuk	96.3	94.8	96.1	97.5
8	Makan sayur dan buah setiap hari	91.9	92.5	95.5	97.0
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	94.4	93.5	94.3	95.7
10	Tidak merokok di dalam rumah	65.8	67.5	70.1	71.3

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terdapat tiga indikator dengan capaian terendah yaitu :

- Indikator "Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan"
- Indikator "Menggunakan Jamban Sehat"
- Indikator "Tidak merokok di dalam rumah"

Adapun penyebab dari rendahnya capaian ketiga indikator tersebut adalah :

1. Kurangnya dukungan dari suami dan keluarga akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi;
2. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang ASI Eksklusif;
3. Ibu yang bekerja sulit untuk memenuhi kebutuhan ASI bagi bayi sehingga bayi diberi susu formula;
4. Sebagian masyarakat masih berorientasi pada bantuan dalam pembangunan jamban;
5. Sempitnya lahan untuk pembuatan sarana pembuangan;
6. Jamban sehat masih belum menjadi prioritas kebutuhan;
7. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok di dalam rumah khususnya bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
8. Perilaku atau kebiasaan merokok yang sulit diubah dan membutuhkan waktu yang lama;
9. Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi orang yang merokok di dalam rumah.

Upaya yang telah dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan guna mencapai target Persentase Rumah tangga ber-PHBS, diantaranya :

- Pelaksanaan program inovasi ngariung sehat di wilayah yang memiliki cakupan PHBS RT yang rendah;
- Pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR) khususnya di wilayah dengan realisasi indikator tidak merokok di dalam rumah yang rendah;
- Peningkatan sosialisasi melalui penyuluhan maupun media promosi kesehatan baik media cetak, media sosial, media elektronik terkait Jamban sehat, ASI Eksklusif, dan tidak merokok di dalam rumah;
- Penyuluhan ASI Eksklusif tidak hanya kepada ibu hamil dan ibu menyusui tetapi juga kepada suami dan keluarga agar mendukung pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan;
- Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kesehatan terutama dalam mendukung indikator tidak merokok di dalam rumah;
- Adanya kebijakan di masing-masing wilayah seperti Surat Edaran Lurah kepada masyarakat untuk mengakses jamban sehat;
- Kegiatan pemicuan STBM yang dilaksanakan dengan melibatkan kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak buang air besar sembarangan dan mendorong masyarakat untuk berusaha memiliki dan menggunakan sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan;
- Adanya bantuan pembangunan sarana jamban dan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) komunal yang bersumber dana dari pemerintah maupun non pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemakaian jamban yang memenuhi syarat kesehatan.



Kegiatan Monev Program Ngariung Sehat

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan adalah Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.4/Kep.254-Bag.Org/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45.300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Berdasarkan Permenpan 25 Tahun 2020, tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

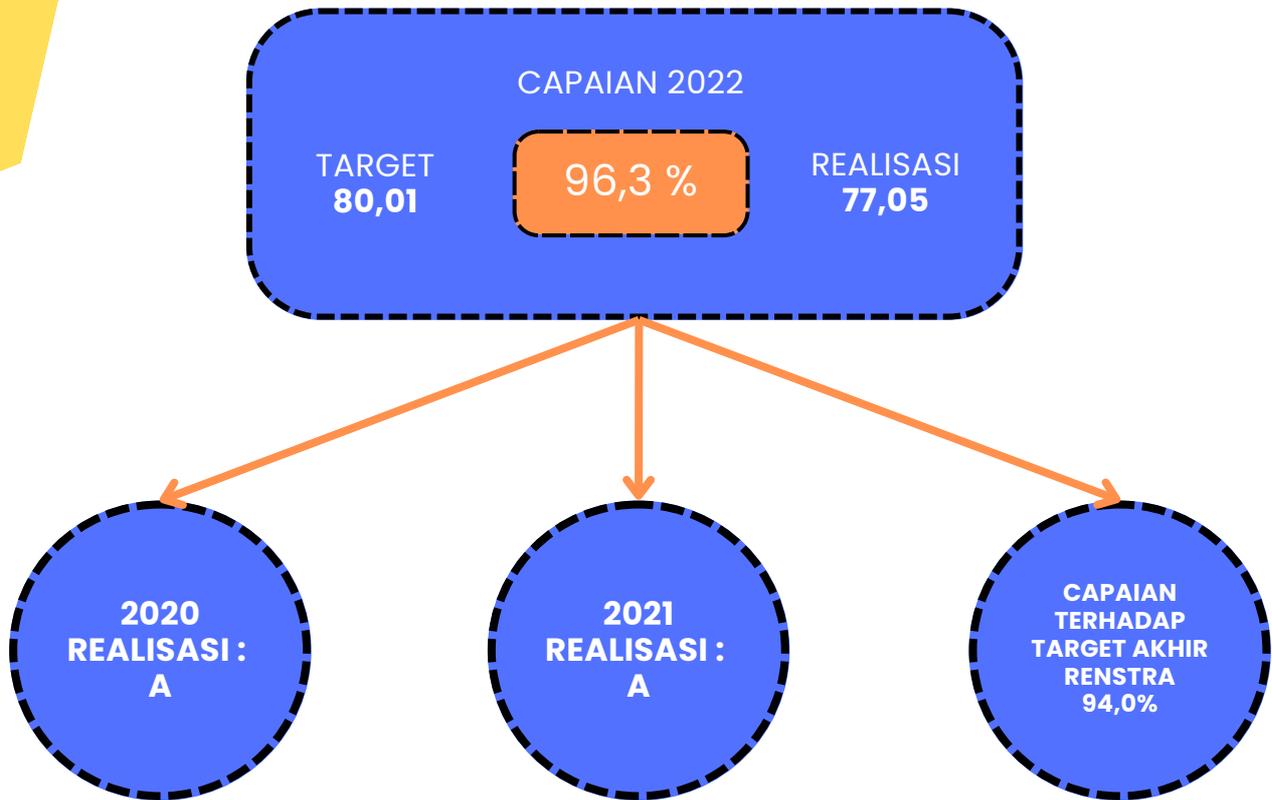
- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- Birokrasi yang Kapabel;
- Pelayanan Publik yang Prima.

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus kepada delapan area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Publikasi Standar, Maklumat, Alur Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Bogor

BAGAN 3.2 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH



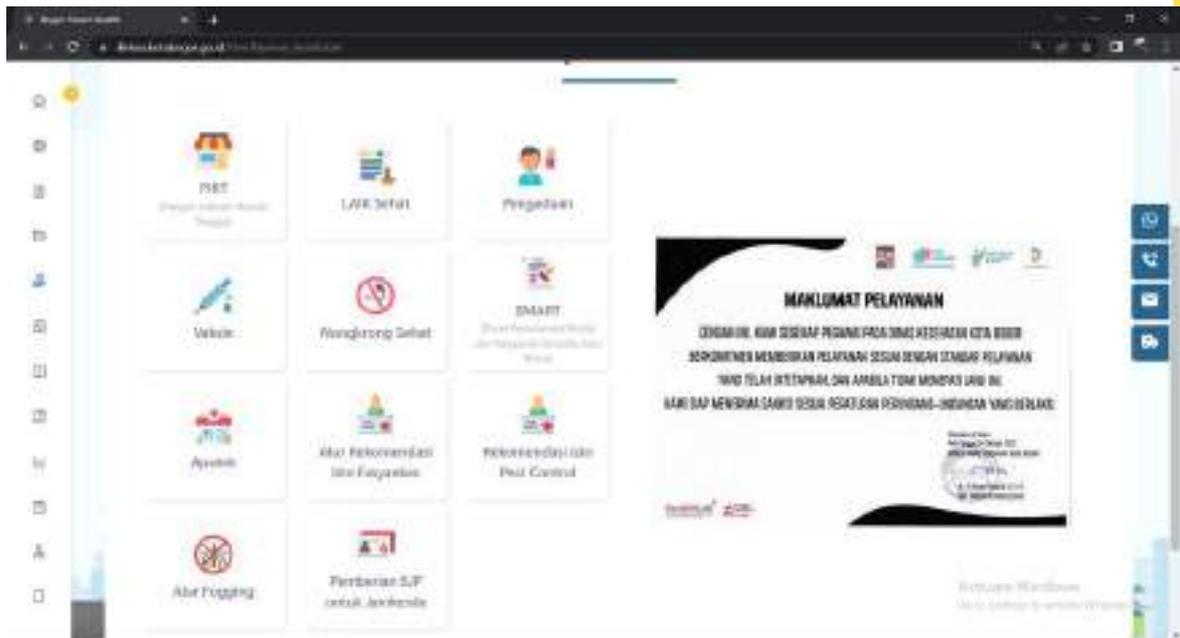
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan pada Tahun 2020 dan 2021 mendapatkan nilai A. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil *Self Assesment* Tim Aesor Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Tahun 2021. Sedangkan di Tahun 2022 terdapat perubahan dalam sistem penilaian Indeks Reformasi Birokrasi meliputi perubahan Indikator Penilaian, Tim Penilai, dan Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di semua OPD se-Kota Bogor. Berdasarkan hasil tim penilai Reformasi Birokrasi OPD Kota Bogor Tahun 2022, seluruh perangkat daerah mengalami penurunan nilai indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini terjadi juga pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 77,05. Akan tetapi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami kenaikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Indikator AKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor

Indikator	Realisasi		Target	Realisasi	Capaian
	2020	2021	2022		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	BB	A	A	100%

Upaya yang telah dilakukan

- Dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat telah menggunakan teknologi informasi seperti <https://oss.go.id/> serta segala informasi alur layanan dapat diakses melalui : https://dinkes.kotabogor.go.id/User/layanan_kesehatan



- Selama Tahun 2022 Dinas Kesehatan telah mendapatkan beberapa apresiasi diantaranya :

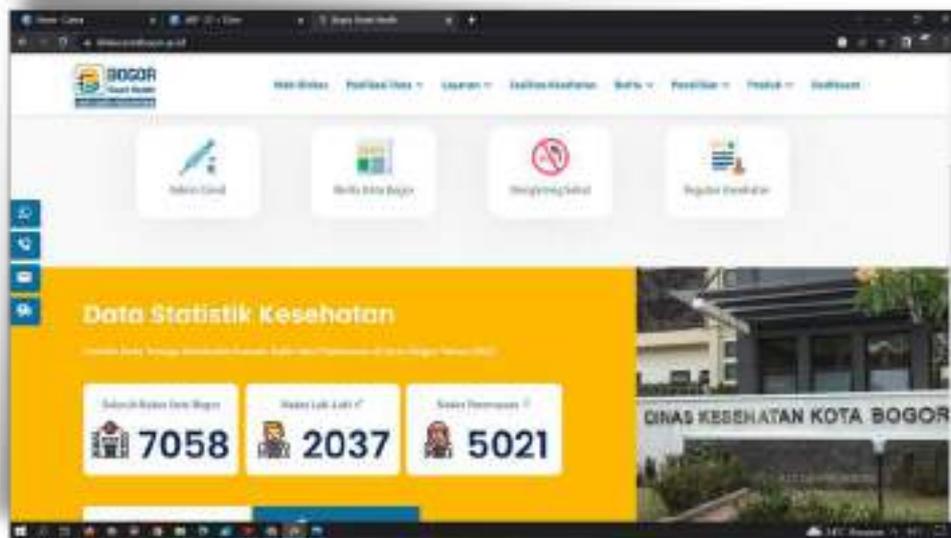


Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Terbaik III pada pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kategori Daerah Kabupaten/Kota dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Kota dengan Pelaporan Implementasi Germas Terbaik dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2022



- Dinas Kesehatan Tahun 2022 memiliki satu agen perubahan yang mana telah membuat inovasi dan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. Agen Perubahan pada Dinas Kesehatan telah membuat Aksi Perubahan yang bernama **Bogor Smart Health**. Bogor Smart Health - Satu Data Kesehatan merupakan integrasi data untuk peningkatan pelayanan kesehatan cerdas dalam mendukung terwujudnya Kota Bogor Smart Health City.



sumber : <https://dinkes.kotabogor.go.id/>

- Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan penyebaran informasi melalui berbagai media sosial diantaranya Instagram dan Website Dinkes.



Penyebarluasan Informasi melalui Instagram terkait tarif pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018. Tarif retribusi tersebut berlaku terhadap tiga pelayanan publik yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Masyarakat.

ID	Judul Dokumen	Dinas Kota Bogor	Tipe	Tanggal	Aksi
1	LAKR 2021	Dinas Kota Bogor	Buku	12	Lihat File / Download File
2	Renstra Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bogor 2019-2024	Puskesmas	Perencanaan	19	Lihat File / Download File
3	SK Bupati Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022	Dinas Kota Bogor	Peraturan	12	Lihat File / Download File
4	SK Kompensasi Pelayanan Publik Tahun 2022	Dinas Kota Bogor	Peraturan	9	Lihat File / Download File
5	SK Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor	Dinas Kota Bogor	Peraturan	9	Lihat File / Download File
6	Wali Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021	Dinas Kota Bogor	Buku	08	Lihat File / Download File
7	Keselamatan (SD) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kesehatan Pekerjaan Orang Suku Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	BKPP Suban Tajur Pengantar COVID-19	Peraturan	7	Lihat File / Download File
8	SOP Pengabdian Masyarakat 2022	Dinas Kesehatan	SOP	09	Lihat File / Download File
9	SK TM PPD	Dinas Kesehatan	Surat Keputusan	7	Lihat File / Download File
10	SK Pengabdian Masyarakat dan Media Sosial Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	SOP	09	Lihat File / Download File

Penyebarluasan informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2021, SK Budaya Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022, SK Kompensasi Pelayanan Publik Tahun 2022.

Tahun 2022 Dinas Kesehatan memperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 84,1 dengan kriteria mutu pelayanan BAIK. Informasi tersebut telah dipublikasi di media sosial dan telah dipublikasikan pada Lobby Gedung B Dinas Kesehatan.



Begitupun halnya dengan Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan, telah dilakukan publikasi baik melalui media sosial maupun media komunikasi massa tulis (Mading).

Rekomendasi dari Tim Penilai

Berdasarkan hasil Tim Penilai Reformasi Birokrasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut :

- Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
- Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah;
- Kebijakan terkait keterbukaan informasi publik telah ditetapkan, namun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan secara berkala;
- Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya;
- Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum diimplementasikan pada seluruh pegawai;
- Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
- Standar pelayanan telah ditetapkan dan dimaklumkan, namun belum dilakukan reviu dan perbaikan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat);
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (SKM) baru dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

B. REALISASI ANGGARAN

Penilaian kinerja capaian keuangan diukur berdasarkan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja yang mendukung pelaksanaan pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Berikut Pengukuran Kinerja Keuangan yang dihitung dengan membandingkan Pagu Anggaran dengan Realisasi yang mendukung setiap sasaran kinerja :

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALIASI	%
Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp148.234.803.580,00	Rp133.342.636.080,00	89,95%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp11.133.463.888,00	Rp10.042.458.574,00	90,20%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp530.618.700,00	Rp468.829.300,00	88,36%
Meningkatnya Rumah tangga sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp9.659.464.700,00	Rp9.518.434.650,00	98,54%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp86.716.272.871,00	Rp83.387.403.495,00	96,16%
TOTAL		Rp256.274.623.739,00	Rp236.759.762.099,00	92,39%

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa total pagu anggaran yang menunjang 5 (lima) program di Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar Rp. 256.274.623.739,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.759.762.099,00 (92,39%).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian serapan anggaran tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021. Capaian serapan anggaran tahun 2021 sebesar 85,30% sedangkan tahun 2022 sebesar 92,39%.

Tabel 3.7 Perbandingan Penggunaan Anggaran Tahun 2021–2022

PROGRAM	2021		%	2022		%
	PAGU	REALIASI		PAGU	REALIASI	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,679,130,421	130,262,160,443	78,15	148.234.803.580	133.342.636.080	96,16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21,158,388,076	19,419,616,615	91,78	11.133.463.888	10.042.458.574	90,20
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	606,888,000	501,206,500	82,59	530.618.700	468.829.300	88,36
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14,931,976,000	14,718,841,550	98,57	9.659.464.700	9.518.434.650	98,54
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,863,332,223	81,816,223,459	95,29	86.716.272.871	83.387.403.495	96,16
	289.239.714.720	246.718.048.567	85,30	256.274.623.739	236.759.762.099	92,39

Pagu Anggaran tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022 dikarenakan tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapatkan dana tambahan bersumber anggaran DBH-CHT untuk penanggulangan Covid-19.

BAB 4

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, dari 3 (tiga) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Selain itu, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran strategis termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan didukung oleh 5 Program dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.759.762.099,00 (92,39%).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat menjadi bahan untuk perumusan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor yang menggambarkan capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bogor.

LKIP

—

2

0

2

2

—

KOTA BOGOR, JAWA BARAT

**DIN
KES**